



LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM

Tahun Anggaran 2021
Semester II

ESELON 1

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, Februari 2022
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum.....	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	54
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Depok, Februari 2022
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester II Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode yang berakhir per 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.390.398.387,00 atau mencapai 221% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.081.139.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp277.241.351.217,00 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp.281.179.671.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.444.194.955.126,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp547.013.508,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.440.992.441.526,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.655.500.092,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp75.798.211,00 dan Rp1.444.119.156.915,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.061.438.630,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp178.540.397.726,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp177.478.959.096,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.050.982.771,00 dan (Rp176.427.976.325,00) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp176.427.976.325,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.342.991.582.367,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp176.427.976.325,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp1.232.856.936,00) dan transaksi antar entitas senilai Rp278.788.407.809,00 kenaikan/penurunan ekuitas Rp101.053.575.506,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.444.119.156.915,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II TA 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual..

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021		% thd Angg	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.081.139.000	2.390.398.387	221,10	1.536.070.852
JUMLAH PENDAPATAN		1.081.139.000	2.390.398.387	221,10	1.536.070.852
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	34.280.563.000	34.020.333.152	99,24	29.970.614.033
Belanja Barang	B.4	127.581.463.000	124.595.754.966	97,66	90.705.625.873
Belanja Modal	B.5	119.317.645.000	118.625.263.099	99,42	107.433.288.110
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		281.179.671.000	277.241.351.217	98,60	228.109.528.016

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
NERACA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNBP	C.4		55.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		(275.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.10		54.725.000
Persediaan	C.11	547.013.508	736.417.740
Persediaan yang Belum Diregister	C.12		-
Jumlah Aset Lancar		547.013.508	791.142.740
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.13	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.15	92.755.631.717	77.320.563.531
Gedung dan Bangunan	C.16	335.299.814.950	239.994.199.536
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	9.395.644.993	9.444.644.993
Aset Tetap Lainnya	C.18	2.972.643.997	2.972.643.997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	7.992.464.203	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(96.423.826.334)	(77.647.443.838)
Jumlah Aset Tetap		1.440.992.441.526	1.341.084.676.219
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	2.537.559.833	1.835.302.990
Aset Lain-Lain	C.22	8.310.389.928	7.090.315.928
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(8.192.449.669)	(7.704.177.285)
Jumlah Aset Lainnya		2.655.500.092	1.221.441.633
JUMLAH ASET		1.444.194.955.126	1.343.097.260.592
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24		-
Utang pada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	75.798.211	105.678.225
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		75.798.211	105.678.225
JUMLAH KEWAJIBAN		75.798.211	105.678.225
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1.444.119.156.915	1.342.991.582.367
JUMLAH EKUITAS		1.444.119.156.915	1.342.991.582.367
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.444.194.955.126	1.343.097.260.592

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.061.438.630	1.079.169.006
JUMLAH PENDAPATAN		1.061.438.630	1.079.169.006
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	34.020.333.152	29.963.667.833
Beban Persediaan	D.3	1.836.987.089	1.909.346.742
Beban Barang dan Jasa	D.4	94.190.195.817	67.626.170.915
Beban Pemeliharaan	D.5	11.944.059.152	12.026.808.985
Beban Perjalanan Dinas	D.6	16.616.890.640	10.345.507.845
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	19.931.931.876	15.220.740.033
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10		(47.425)
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		178.540.397.726	137.092.194.928
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(177.478.959.096)	(136.013.025.922)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		79.141.388	230.559.121
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya		971.841.383	472.035.793
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.224.698.383	542.823.729
Beban dari Kegiatan Non Operasional		252.857.000	70.787.936
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		1.050.982.771	702.594.914
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(176.427.976.325)	(135.310.431.008)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(176.427.976.325)	(135.310.431.008)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1	1.342.991.582.367	1.230.994.765.415
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(176.427.976.325)	(135.310.431.008)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(1.232.856.936)	(5.278.724.897)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		(5.512.500)	(50.593.500)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	-	529.978.604
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(1.227.619.436)	(5.758.110.001)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	275.000	-
JUMLAH		(1.232.856.936)	(5.278.724.897)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	278.788.407.809	252.585.972.857
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		101.053.575.506	111.996.816.952
EKUITAS AKHIR	E.5	1.444.119.156.915	1.342.991.582.367

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan,

pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat

penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

- Seluruh aparaturnya Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1	-	-	-	1

4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			3	3	-	-	6

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

- **Aset Lainnya**
 - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk,	10

Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- **Ekuitas**

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Semester II TA 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2021	
	Anggaran	Anggaran
	Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.081.139.000	1.081.139.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	1.081.139.000	1.081.139.000
Belanja		
Belanja Pegawai	28.368.995.000	34.280.563.000
Belanja Barang	234.256.556.000	127.581.463.000
Belanja Bantuan Sosial		0
Belanja Modal	220.056.151.000	119.317.645.000
Jumlah Belanja	482.681.702.000	281.179.671.000

B.1 PENDAPATAN

*Realisasi
Pendapatan
Rp2.390.398.387,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp2.390.398.387,00 atau mencapai 221.1% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.081.139.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	143.857.359	427.443.308	(66,34)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000	987.500.000	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	9.485.000	(100,00)
Pendapatan Jasa	-		
Pendapatan Denda	33.972.507	463.000	7.237,47
Pendapatan Lain-lain	1.225.068.521	111.179.544	1.001,88
Jumlah	2.390.398.387	1.536.070.852	55,62

Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 55,62% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 31 Desember TA 2020. Hal ini disebabkan karena pembayaran peserta diklat telah selesai pada bulan Juli untuk kegiatan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan (PNBP) 1 angkatan serta terdapat pembayaran denda atas temuan BPK.

Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251)

- Terdapat realisasi pada Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp79.141.388,00 yaitu berupa hasil lelang kendaraan dinas berupa 2 bus milik BPSDM Hukum dan HAM.
- Realisasi Akun [425131] Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.715.971,00 terdiri dari satker BPSDM senilai Rp. 9.057.090,- atas sewa mesin ruang ATM dan satker Politeknik Imigrasi senilai Rp658.881,00 atas sewa rumah dinas dan satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp55.000.000,00 Atas sewa gedung ALTRI.

B. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)

- Realisasi Akun [425421] Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp987.500.000,00 untuk pelaksanaan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan satu angkatan.

C. Pendapatan Denda (4258)

- Terdapat Realisasi Akun [425811] Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp33.972.507,00 berupa :
 1. Pengembalian denda temuan BPK atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung politeknik sebesar Rp13.854.418,00.
 2. Pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian pengadaan akses internet di BPSDM TA.2021 termin 1 sebesar Rp3.116.046,00.
 3. Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pengadaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan gedung Auditorium dan gedung olahraga Politeknik Termin 4 sebesar Rp352.487,00.
 4. Pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan konsultan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sebesar Rp1.934.900,00.
 5. Pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan konsultan persetujuan teknik pemenuhan baku mutu air limbah sebesar Rp1.928.300,00.
 6. Pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa konsultan andalin pembangunan gedung politeknik sebesar Rp12.786.356,00.

D. Pendapatan Lain-Lain (4259)

➤ Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp4.807.799,00 tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan rincian sebagai berikut :

1. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.968,00 berupa pembulatan gaji.
2. Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp4.065.617,00 berupa pembulatan gaji dan Pengembalian atas temuan Inspektorat untuk kelebihan pembayaran tunjangan kinerja 2 bulan Tahun 2019 a.n Budi Mulyawan Rp2.031.680,00 dan Pengembalian atas temuan Inspektorat untuk kelebihan pembayaran tunjangan kinerja 2 bulan Tahun 2019 a.n Bobby Briando Rp.2.031.680,00.
3. Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp36,00 berupa pembulatan gaji.
4. Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp740.178,00 berupa pembulatan gaji.

➤ Adanya Realisasi Akun [425912] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp117.918.525,00 tanpa Estimasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp115.418.525,00 berupa Pengembalian Belanja Barang Operasional penanganan pandemi Covid-19 TA.2020 sebesar Rp7.000.000,00, pengembalian atas temuan Inspektorat untuk Honorarium PPK Politeknik Imigrasi bulan Mei 2019 atas nama Sohirin sebesar Rp22.192.000,00, penerimaan kembali atas temuan BPK atas kelebihan pembayaran fotocopy senilai

Rp27.231.125,00, penerimaan kembali atas temuan BPK atas kelebihan pembayaran cetakan senilai Rp58.995.400,00.

2. Satker Politeknik Ilmu Pemasaryakatan senilai Rp2.500.000,00 pengembalian atas kelebihan penarikan tunjangan ikatan dinas taruna poltekip tahun anggaran 2020
- Adanya Realisasi Akun [425913] Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp1.101.972.059,00 dengan rincian sebagai berikut :
- BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp835.253.420,00 berupa pengembalian belanja atas temuan BPK dikarenakan kelebihan bayar pada gedung dan bangunanan.
 - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp266.718.639,00 berupa Pengembalian atas temuan temuan ITJEN Rp68.813.148,00. dan pengembalian atas temuan BPK Rp197.905.491,00.
- Adanya Realisasi Akun [425999] Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp370.138,00 dengan rincian sebagai berikut :
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp370.138,00 berupa potongan pembayaran gaji pokok secara sistem aplikasi GPP.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Rp277.241.351.217,00

Realisasi Belanja pada 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp277.241.351.217,00 atau 98,9% dari anggaran belanja sebesar Rp281.179.671.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

31 Desember TA 2021

Uraian	TA 2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	34.280.563.000	34.029.542.618	99,27
Belanja Barang	127.581.463.000	125.420.748.707	98,31
Belanja Modal	119.317.645.000	118.636.368.099	99,43
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	281.179.671.000	278.086.659.424	98,9
Pengembalian Belanja		(845.308.207)	-
Total Belanja	281.179.671.000	277.241.351.217	98,6

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program

31 Desember 2021

Program	31 Desember 2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	281.179.671.000	277.241.351.217	98,60
Total Belanja	281.179.671.000	277.241.351.217	98,60

Dibandingkan dengan 31 Desember TA 2020, Realisasi Belanja pada 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,54%. Hal ini disebabkan penambahan anggaran belanja

modal BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu berupa belanja Modal pembelian aplikasi dan software yang akan digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta diklat dan para siswa dan siswi Taruna Politeknik.

*Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	34.020.333.152	29.970.614.033	13,51
Belanja Barang	124.595.754.966	90.705.625.873	37,36
Belanja Modal	118.625.263.099	107.433.288.110	10,42
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	277.241.351.217	228.109.528.016	21,54

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp34.020.333.152,00*

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp34.020.333.152,00 dan Rp29.970.614.033,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 13,51% dari 31 Desember TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang perpindahan dari JFU menjadi JFT

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	32.168.675.618	29.419.336.771	9,35
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	1.860.867.000	553.107.000	-
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	34.029.542.618	29.972.443.771	13,54
Pengembalian Belanja Pegawai	(9.209.466)	(1.829.738)	403,32
Jumlah Belanja	34.020.333.152	29.970.614.033	13,51

*Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21.934.033.000	21.806.700.840	-	21.806.700.840	99,42
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	375.000	347.450	4.366	343.084	91,49
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.418.575.000	1.404.245.448	-	1.404.245.448	98,99
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	363.656.000	355.178.798	-	355.178.798	97,67
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	957.789.000	955.210.000	1.620.000	953.590.000	99,56
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.819.305.000	1.811.090.000	-	1.811.090.000	99,55
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	140.206.000	132.790.482	-	132.790.482	94,71
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.130.874.000	1.124.682.600	-	1.124.682.600	99,45
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.037.120.000	3.973.745.000	-	3.973.745.000	98,43
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	615.467.000	604.685.000	7.585.100	597.099.900	97,02
512211	Belanja Uang Lembur	1.863.163.000	1.860.867.000	-	1.860.867.000	99,88
		34.280.563.000	34.029.542.618	9.209.466	34.020.333.152	99,27

Pada Tabel di atas terdapat pengembalian belanja pegawai dengan sebesar Rp9.209.466,00 yang disebabkan di antaranya Pengembalian belanja atas terbitnya Surat Keputusan bagi PNS yang baru mendapatkan tunjangan fungsional tertentu, dan tunjangan struktural serta biaya pembulatan gaji terdapat pada satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 31 desember 2021 terdapat pengembalian belanja dengan rincian:

- BPSDM sebesar Rp4.952.405,00
- Poltekim sebesar Rp1.110.379,00
- Poltekip sebesar Rp642,00
- Badiklat Kepri sebesar Rp2.960.510,00
- Badiklat Jateng sebesar Rp100,00
- Badiklat Sulut sebesar Rp185.430,00

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp124.595.754.966,00

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp124.595.754.966,00 dan Rp90.705.625.873,00.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 37,36% dari 31 Desember TA 2020. Hal ini disebabkan meningkatnya belanja barang non operasional dan belanja jasa dikarenakan pandemi covid-19 dan pelaksanaan diklat yang dilakukan dengan metode jarak jauh sepanjang tahun 2021 .

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	19.445.903.977	16.591.330.382	17,21
Belanja Barang Non Operasional	38.677.857.728	32.268.004.364	19,86
Belanja Persediaan	1.592.248.347	719.490.990	121,30
Belanja Jasa	36.394.997.040	18.315.642.469	98,71
Belanja Pemeliharaan	12.268.358.142	12.584.591.323	(2,51)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.041.383.473	10.524.782.317	61,92
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	125.420.748.707	91.003.841.845	37,82
Pengembalian Belanja	(824.993.741)	(298.215.972)	
Jumlah Belanja	124.595.754.966	90.705.625.873	37,36

Realisasi Anggaran Belanja Barang
per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5211	Belanja Barang Operasional	19.977.360.000	19.445.903.977	4.725.000	19.441.178.977	97,34
5212	Belanja Barang Non Operasional	39.204.708.000	38.677.857.728	54.024.455	38.623.833.273	98,66
5218	Belanja Barang Persediaan	1.618.558.000	1.592.248.347	-	1.592.248.347	98,37
5221	Belanja Jasa	36.978.038.000	36.394.997.040	337.831.953	36.057.165.087	98,42
5231	Belanja Pemeliharaan	12.401.424.000	12.268.358.142	3.919.500	12.264.438.642	98,93
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.272.375.000	17.041.383.473	424.492.833	16.616.890.640	98,66
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	129.000.000	-	-	-	-
		127.581.463.000	125.420.748.707	824.993.741	124.595.754.966	99

Pada laporan realisasi belanja barang terdapat pengembalian yang terdiri dari :

- Pengembalian belanja akun 5211 Belanja Barang Operasional sebesar Rp4.725.000,00 merupakan pengembalian dari satker Poltekim berupa Pengembalian kelebihan pembayaran dari pengadaan pakaian pegawai Politeknik Imigrasi Tahun 2021
- Pengembalian belanja akun 5212 Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp54.024.455,00 antara lain :
Satker BPSDM sebesar Rp14.489.855,00 atas pengembalian biaya komunikasi peserta diklat
 - Sakter Poltekim Rp37.154.600 atas akumulasi belanja bahan Rp41.000,00 belanja honor output kegiatan Rp.1.140.000,00 belanja barang Non operasional Lainnya Rp35.595.000,00 belanja barang non operasional-penanganan pandemi COVID-19 Rp378.600,00
 - Satker Poltekip Rp 2.380.000,00 berupa belanja honor output kegiatan.
- Pengembalian belanja akun 5221 Belanja Jasa sebesar Rp337.831.953,00 antara lain :

- Satker BPSDM sebesar Rp335.676.953,00 atas pengembalian honor narasumber serta tenaga pengajar sebesar Rp332.013.953 dan pengembalian atas jasa penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp3.663.000,00
- Saker Poltekim sebesar Rp2.155.000,00
- Pengembalian belanja akun 5231 Belanja Pemeliharaan sebesar Rp3.919.500,00 merupakan pengembalian dari Satker Poltekim atas pengembalian pemeliharaan peralatan dan mesin.
- Pengembalian belanja akun 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp424.292.833,00 antara lain:
 - Satker BPSDM Rp345.925.253,00 atas Perjalanan Biasa Rp327.973.053,00, Perjalanan dinas dalam kota Rp1.950.000,00 , Perjalanan dinas penanganan pandemi COVID-19 Rp16.002.200,00
 - Satker Poltekim Rp21.930.000,00 atas pengembalian perjalan dinas biasa
 - Satker Poltekip Rp56.637.580,00 atas atas pengembalian perjanan dinas biasa.

Dalam hal penanganan pandemi COVID-19 BPSDM Hukum dan HAM mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp27.503.404.145,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 terserap sebesar Rp27.060.370.857,00 atau sebesar 99,23% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19
per 31 Desember 2021*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	5.164.079.000	5.139.604.102	-	5.139.604.102	99,53
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	4.457.376.000	4.250.759.883	14.868.455	4.235.891.428	95,03
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	443.490.000	442.668.487	-	442.668.487	99,81
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	652.415.000	626.288.200	3.663.000	622.625.200	95,43
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-	2.700.000	2.700.000	-	2.700.000	100,00
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	129.000.000	-	-	-	-
		10.849.060.000	10.462.020.672	18.531.455	10.443.489.217	99

Adapun Pengembalian Belanja dalam penanganan covid-19 sebesar Rp18.531.455,00 terdapat pada :

- Belanja Barang non operasional sebesar Rp14.868.455,00 terdiri atas :
 - Satker BPSDM akun 521241 sebesar Rp14.489.855,00 atas pengembalian biaya komunikasi peserta diklat.
 - Satker Poltekim akun 521241 sebesar Rp378.600,00 berupa pengembalian biaya komunikasi dan kelebihan pembayaran ID ZOOM.
- Belanja Jasa akun 522192 terdapat pada satker BPSDM sebesar Rp3.663.000,00 berupa pengembalian kegiatan evaluasi penyelenggaraan PJJ DIKLAT Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp118.625.263.099,00

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp118.625.263.099,00 dan Rp107.433.288.110,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,42% dibandingkan 31 Desember TA 2020 hal ini dikarenakan adanya,

pengadaan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, pengadaan inventaris kantor serta pembelian Aplikasi yang ada di masing-masing satker BPSDM Hukum dan HAM.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	545.800.000	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.920.411.306	21.796.531.148	(26,96)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.007.700.793	83.925.521.608	21,55
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	49.000.000	
Belanja Modal Lainnya	708.256.000	1.116.435.354	0,00
Jumlah Belanja Kotor	118.636.368.099	107.433.288.110	10,43
Pengembalian	(11.105.000)	-	-
Jumlah Belanja	118.625.263.099	107.433.288.110	10,42

Rincian Realisasi Belanja Barang Modal

per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.292.148.000	15.920.411.306	-	15.920.411.306	97,72
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.313.974.000	102.007.700.793	11.105.000	101.996.595.793	99,70
5361	Belanja Modal Lainnya	711.523.000	708.256.000	-	708.256.000	99,54
		119.317.645.000	118.636.368.099	11.105.000	118.625.263.099	99

Rincian Realisasi Belanja Barang Modal Penanganan Pandemi covid-19

per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	51.200.000	50.563.000	-	50.563.000	98,76
		51.200.000	50.563.000	0	50.563.000	99

Pengembalian Belanja Modal sebesar Rp11.105.000,00 terdapat pada Satker BPSDM sebesar Rp1.275.000,00 atas pengembalian honor pengelola kegiatan pemb gedung poliklinik bpsdm ta 2021 dan Rp9.830.000,- atas pengembalian perjadi monitoring pembangunan gedung Poltek Tangerang.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp545.800.000,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	210.295.800,00	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	335.504.200,00	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	545.800.000,00	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	545.800.000,00	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp15.920.411.306,00, mengalami penurunan sebesar (26,96%) bila dibandingkan dengan 31 Desember TA 2020 sebesar Rp21.796.531.148,00. Hal ini disebabkan adanya pengurangan atas pembelian belanja modal peralatan dan mesin untuk mengatasi pandemi dengan memaksimalkan peralatan dan mesin yang telah dibeli pada tahun anggaran yang lalu.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.869.848.306	21.681.561.148	-26,80
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	50.563.000	114.970.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	15.920.411.306	21.796.531.148	-26,96
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	15.920.411.306	21.796.531.148	-26,96

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp101.996.595.793,00 dan Rp83.925.521.608,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.640.554.566	83.925.521.608	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	367.146.227	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	102.007.700.793	83.925.521.608	21,55
Pengembalian Belanja Modal	(11.105.000)	-	-
Jumlah Belanja	101.996.595.793	83.925.521.608	21,53

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,53 % dikarenakan adanya pembangunan dan renovasi Gedung dan Bangunan dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp93.636.985.363,00 Atas pembangunan Gedung Olahraga dan Auditorium Politeknik, Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp7.992.464.203,00 atas pembangunan gedung serbaguna dan asrama 2 lantai, serta Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan Balai Diklat Jawa Tengah atas pengembangan gedung kantor permanen dan gedung asrama permanen sebesar Rp367.146.227,00.

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.943.974.000	101.640.554.566	11.105.000	101.629.449.566	99,42
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	-	-	-	-	91,49
533121	Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	370.000.000	367.146.227	-	367.146.227	98,99
		102.313.974.000	102.007.700.793	11.105.000	101.996.595.793	99

Pengembalian Belanja Modal sebesar Rp11.105.000,00 terdapat pada Satker BPSDM sebesar Rp1.275.000,00 atas pengembalian honor pengelola kegiatan pemb gedung poliktenik bpsdm ta 2021 dan Rp9.830.000,00 atas pengembalian perjadi monitoring pembangunan gedung Poltek Tangerang..

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp49.000.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	-	49.000.000	100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	49.000.000	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	49.000.000	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp708.256.000,00 dan Rp1.116.435.354,00. Realisasi Belanja Modal lainnya pada 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sebesar 36,56% dibandingkan 31 Desember TA 2020. Hal ini disebabkan oleh pengurangan pengadaan software untuk program dan pelatihan yang ada di satuan kerja lingkup Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja <i>Software</i>	708.256.000	1.116.435.354	(36,56)
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	708.256.000	1.116.435.354	(36,56)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	708.256.000	1.116.435.354	(36,56)

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan lain-lain yaitu :

- Satker BPSDM sebesar Rp163.500.000,00 berupa belanja Pembelian *software* komputer sebesar Rp96.500.000,00 berupa aplikasi uji kompetensi pada Pusat Penilaian Kompetensi dan *software* komputer sebesar Rp67.000.000,00 berupa aplikasi *e-library* yang digunakan di perpustakaan.
- Satker Badiklat Jateng sebesar Rp59.500.000,00 berupa pembelian *software* antara lain: Rp29.500.000,00 berupa aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah (SILABA) dan Rp30.000.000,00 berupa aplikasi pengembangan aplikasi Badiklat Learning Center.
- Satker Poltekip sebesar Rp445.256.000,00 berupa pembelian *software* antara lain: Aplikasi *e-library* Rp144.000.000,00, Aplikasi SISTEM Rp147.000.000,00, pengembangan *website* POLTEKIP Rp95.000.000,00 pembelian *backlight* Rp38.500.000,00 dan pembelian Lampu *Acrylic* Rp20.756.000,00.
- Satker Badiklat Kepri sebesar Rp40.000.000,00 berupa pembelian *software* berupa Aplikasi COP untuk Pelatihan diklat, Rp.20.0000.000,00 berupa *software* aplikasi SIKMA (Sistem Informasi Keuangan Mandiri) dan Rp.20.000.000,- berupa *software* aplikasi Sistem Informasi Honorium.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp.0,- Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Rekening Bank	-	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada

bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0,00

Saldo Piutang PNB per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp109.450.000,00 Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNB

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNB	-	55.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertag	-	(275.000)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NET)	-	54.725.000
Jumlah	-	109.450.000

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp0,00*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih–
Piutang Lancar
Rp0,00*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
31 Desember 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-	-	-

C.8 Beban Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di
Muka
Rp0,00*

Saldo Beban Dibayar di Muka 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun

barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

JENIS	TH 2021	TH 2020
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan		
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

JENIS	TH 2021	TH 2020
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp547.013.508,00*

Nilai Persediaan 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp547.013.508,00 dan Rp736.417.740,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

JENIS	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	499.869.908	567.752.386
Barang untuk Pemeliharaan	47.143.600	168.665.354
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	547.013.508	736.417.740

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dokumentasi dan BA Pemeriksaan Barang (stok opname persediaan) terlampir.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Penjualan Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi
Angsuran (TP/TGR) per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020
Rp0,00 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember TA
Angsuran 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar
Rp0,00 Rp0,00 dan Rp0,00.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Penyisihan Piutang Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per
Tak Tertagih – 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-
Piutang Non masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Penyisihan Piutang tak
Lancar Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas
Rp0,00 ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Tanah

*Rp1.089.000.068.000,
00*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.089.000.068.000,00 dan Rp1.089.000.068.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin*

Rp92.775.631.717,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp92.775.631.717,00 dan Rp77.320.563.531,00 Mutasi nilai peralatan dan mesin

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	Rp 77.320.563.531
Mutasi tambah:	Rp 16.281.658.206
Pembelian	Rp 15.927.080.106
Hibah	Rp 23.000.000
Transfer Masuk	Rp 327.706.100
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 3.872.000
Mutasi kurang:	Rp (846.590.020)
Transfer keluar	Rp (280.858.020)
Reklasifikasi Aset	Rp (440.491.000)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp (125.241.000)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 92.755.631.717
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp (58.699.199.146)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp 34.056.432.571

Mutasi bertambah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp11.047.109.820,00.
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp245.338.100,00
- Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan Rp1.138.879.752,00
- Satker Badiklat Kepulauan Riau senilai Rp1.997.104.000,00
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp1.576.092.534,00
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp277.134.000,00

Mutasi kurang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp649.662.820,00
- Satker Politeknik Imigrasi Rp121.369.000,00
- Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp32.577.200,00
- Badiklat Kepri sebesar Rp42.981.000,00

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan*
Rp335.299.814.950,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah Rp335.299.814.950,00 dan Rp.239.994.199.536,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	239.994.199.536
Mutasi tambah:	102.113.746.288
Transfer Masuk	3.684.002.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	93.636.985.363
Perolehan Hasil tindak Lanjut Normalisasi	4.227.007.648
Pengembangan Nilai Aset	367.146.277
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	198.605.000
Mutasi kurang:	(6.808.130.824)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(1.186.411.176)
Transaksi Normalisasi BMN	(4.227.007.648)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	(1.394.712.000)
Saldo per 31 Desember 2021	335.299.815.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(32.335.494.584)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	302.964.320.416

Terdapat Nilai Mutasi Tambah sebesar Rp102.113.746.238,00 berupa :

- satker BPSDM Hukum dan HAM atas transfer dari Sekretariat Jenderal berupa pagar untuk pembangunan Politeknik sebesar Rp3.684.002.000,00.
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp93.636.985.363,00.
BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp93.636.985.363,00.
- Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi dari Badiklat Jateng Rp4.227.007.648,00.
- Pengembangan nilai aset Rp367.146.227,00.
- Penerimaan aset tetap renovasi dari BPSDM sebesar Rp198.605.000,00.

Terdapat Nilai Mutasi Kurang senilai Rp6.808.130.824,00 berupa :

- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas dari satker BPSDM sebesar Rp829.541.975,00 dan satker Badiklat Jateng sebesar Rp356.869.201,00.
- Transaksi normalisasi BMN terdapat pada satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp4.227.007.648,00.
- Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya pada Satker BPSDM sebesar Rp1.394.712.000,00.

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp9.395.644.993,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TAUJ 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.395.644.993,00 dan Rp9.444.644.933,00

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	9.444.644.993
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	49.000.000
Revaluasi Aset	49.000.000
Saldo per 31 Desember 2021	9.395.644.993
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(3.931.557.246)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	5.464.087.747

Mutasi kurang berupa Revaluasi Aset merupakan jaringan sebesar Rp.49.000.000,- milik satker Politeknik Imigrasi berupa pengadaan Aplikasi Jaringan *Online Jurnal System* (OJS).

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp2.972.643.997,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya

per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah Rp2.972.643.997,00 dan Rp2.972.643.997,00.

Saldo per 31 Desember 2020	2.972.643.997
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 31 Desember 2021	2.972.643.997
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2021	(1.537.500.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.435.143.997

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, sebesar Rp2.972.643.997,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.351.026.622,00 berupa monografi 4.777 buah Rp717.668.957,00, Referensi 2 buah Rp108.869.635,00, buku lainnya 794 buah Rp 452.788.030,00, naskah/manuskrip berbahan kertas 1 buah Rp48.220.000,00, alat musik modern/band 1 buah Rp19.480.000,00 dan pahatan logam 1 buah Rp.5.000.000,00.
- Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.867.743.575,- berupa monografi sebanyak 1.653 buah Rp51.093.575,00 dan alat musik modern/band sebanyak 108 buah Rp816.650.000,00.
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.753.873.800,- berupa monografi sebanyak 1480 buah Rp51.503.800,00 dan alat musik modern/band 226 6 buah Rp702.370.000,00.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp7.992.464.203,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.992.464.203,00 dan Rp0,00 yang merupakan

pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Konstruksi dalam pengerjaan terdapat pada Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp7.992.464.203,00 dengan pengerjaan selesai 85,35% dikarenakan belum selesainya pembangunan pada akhir tahun 2021 dan rencanya akan selesai pada februari tahun 2022

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp96.423.826.334,0
0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing Rp96.423.826.334,00 dan Rp77.647.443.838,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	92.696.375.717	58.699.199.146	33.997.176.571
2	Gedung dan Bangunan	343.292.279.153	32.255.569.942	311.036.709.211
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.395.644.993	3.931.557.246	5.464.087.747
4	Aset Tetap Lainnya	2.972.643.997	1.537.500.000	1.435.143.997
Total		448.356.943.860	96.423.826.334	351.933.117.526

C.21 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp2.537.559.833,00*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.537.559.833,00 dan Rp1.835.302.990,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

31 Desember 2021

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 2.537.559.833
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		Rp 2.537.559.833

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.835.302.990
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 619.000.000
Transfer Masuk	Rp 4.256.843
Reklasifikasi Masuk	Rp 49.000.000
Pengembangan Nilai Aset	Rp 30.000.000
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 2.537.559.833
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Desember 2021	Rp 1.304.948.798
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp 1.232.611.035

Penggunaan Aset tak Berwujud berupa *software* sebesar Rp2.537.559.833,00 yang dicatat sebagai asset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas) terdapat pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.090.352.500,00 terdiri dari :
 - a. barcode : digunakan untuk memberi tanda pada BMN yang berada di lingkungan BPSDM dan CBHRIS : aplikasi kediklatan sebesar Rp81.875.000,00.
 - b. Modul aplikasi *Self Assesment* Rumah Belajar ASN Rp88.350.000,00.
 - c. Modul aplikasi *Self Service* Rumah Belajar ASN Rp83.900.000,00.
 - d. Manajemen diklat Rumah Belajar ASN Rp88.800.000,00.
 - e. Modul Aplikasi *Learning Journey* Rp90.090.000,00.
 - f. Modul *Digital Library* Rp87.780.000,00.

- g. Aplikasi *E-learning* Rp90.502.000,00.
 - h. Modul Sertifikasi dan pelatihan Rp93.857.000,00.
 - i. Modul *Community of Practive* Rp88.660.000,00.
 - j. modul aplikasi rumah belajar ASN Rp82.445.000,00.
 - k. Aplikasi peserta Diklat di Pusat Penilaian Kompetensi sebesar Rp50.593.500,00.
 - l. Aplikasi uji kompetensi Rp96.500.000,00.
 - m. Aplikasi *e-book e-library* Rp67.000.000,00.
 - Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp652.865.033,00 berupa *software* komputer pada laboratorium keimigrasian.
 - Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp634.300.000,00 terdiri dari :
Software sebesar Rp634.300.000,00 berupa :
 - 1. Aplikasi SIMENTOR Rp242.000.000,00
 - 2. Aplikasi *e-library* Rp144.000.000,00
 - 3. Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Taruna dan Orang Tua untuk pembuatan Sistem Informasi Akademik (SIK) Rp248.300.000,00
 - Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp69.042.300,00 dengan rincian Rp29.042.300,00 berupa Aplikasi COP untuk Pelatihan diklat, Rp.20.0000.000,00 berupa *software* aplikasi SIKMA (Sistem Informasi Keuangan Mandiri) dan Rp20.000.000,00 berupa *software* aplikasi Sistem Informasi Honorium.
 - Satker Badiklat Jawa Tengah Sebesar Rp91.000.000,00 degan rincian Rp31.500.000,00 berupa aplikasi Badiklat *Learning Center* dan Rp29.500.000,00 berupa aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah (SILABA) dan Rp30.000.000,00 berupa aplikasi pengembangan aplikasi Badiklat *Learning Center*.
- Adapun Mutasi Tambah pada aset tak berwujud sebesar Rp702.256.843,00 antara lain:
- Pembelian sebesar Rp619.000.000 terdiri dari
 - a. Satker BPSDM sebesar Rp163.500.000,00 berupa Aplikasi uji kompetensi Rp96.500.000,00 dan Aplikasi

e-book -library Rp67.000.000,00

- b. Satker Poltekip sebesar Rp386.000.000,00 berupa Aplikasi SIMENTOR Rp242.000.000,00 dan Aplikasi *e-library* Rp144.000.000,00
- c. Satker Badiklat Kepri Rp40.000.000,00 berupa *software* aplikasi SIKMA (Sistem Informasi Keuangan Mandiri) Rp20.000.000,00 dan *software* aplikasi Sistem Informasi Honorium Rp20.000.000,00
- d. Satker Badiklat Jawa Tengah Rp29.500.000,00 berupa aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah (SILABA)
- Transfer masuk berupa *software* komputer pada Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp4.256.843,00.
- Reklasifikasi Masuk terdapat pada Satker Politeknik Imigrasi Sebesar Rp49.000.000,00 dikarenakan salah pencatatan kode akun barang pada semester sebelumnya.
- Pengembangan Nilai Aset Tetap *software* komputer pada Satker Badiklat Jateng Rp30.000.000,00

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp8.310.389.928,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah Rp8.310.389.928,00 dan Rp7.090.315.928,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2021
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	Rp 8.310.389.928	Rp 7.090.315.928
Total	Rp 8.310.389.928	Rp 7.090.315.928

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 7.090.315.928
Mutasi tambah:	Rp 1.835.203.000
Penghentian Aset dr penggunaan	Rp 1.835.203.000
Mutasi kurang:	Rp 615.129.000
Penghapusan BMN	Rp 615.129.000
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 8.310.389.928
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Rp 6.887.500.871
Nilai Buku per 30 September 2021	Rp 1.422.889.057

Mutasi tambah Aset Lain-lain terdiri dari :

- Satker BPSDM sebesar Rp1.781.614.000,00 berupa penghentian aset dari penggunaannya atas 3 unit mini bus sebesar Rp325.830.000,00 dan 4 unit sepeda motor sebesar Rp61.072.000,00 dan penambahan 9 unit bangunan sebesar Rp1.394.712.000,00 terdiri atas 2 unit bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen Rp444.660.000,00, 5 unit bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen sebesar Rp622.494.000,00 dan 1 unit bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen sebesar Rp327.558.000,00.
- Satker Badiklat Kepri sebesar Rp39.109.000,00 berupa 1 unit mesin absensi sebesar Rp11.400.000,00, 2 unit kursi besi/metal Rp8.019.000,00, 2 unit A.C Split sebesar Rp10.560.000,00 dan 2 unit printer Rp9.130.000,00.
- Satker Badiklat Jateng sebesar Rp14.480.000,00 berupa 1 unit mesin absensi sebesar Rp11.400.000,00 dan 1 unit *clinical thermometer* Rp3.080.000,00.

Mutasi kurang Aset Lain-lain terdiri dari:

- Poltekim sebesar Rp615.129.000,00 berupa penghapusan 6 unit barang yang terdiri dari 1 unit Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang) senilai Rp232.897.000,00, 3 unit Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah) senilai Rp 361.196.000,00 dan 2 unit Sepeda Motor senilai Rp21.036.000,00.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp8.192.449.669,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.192.449.669,00 dan Rp7.704.177.285,00 Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	2.537.559.833	1.304.948.798	1.232.611.035
2	ATB Lainnya	0		-
Jumlah		2.537.559.833	1.304.948.798	1.232.611.035
B	Aset Lainnya	8.310.389.928	6.887.500.871	1.422.889.057
Jumlah		8.310.389.928	6.887.500.871	1.422.889.057
Total		10.847.949.761	8.192.449.669	2.655.500.092

C. 24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan bulan November dan Desember 2019 pada Balai Diklat Sulawesi Utara dan segera akan ditindaklanjuti.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -
2	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
3	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
Total		Rp -

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp75.798.211,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 sebesar Rp75.798.211,00 dan Rp105.678.225,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

31 Desember TA 2021

Uraian	Jumlah	Penjelasan
PT. Bank Mandiri Persero	Rp 7.452.099	Sewa Ruang ATM
STIH LITIGASI	Rp 68.346.112	sewa Gedung STIH LITIGASI ALTRI
Badan Lainnya	Rp -	
Total	Rp 75.798.211	

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang Masih
harus Dibayar
Rp0,00*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	-	-

C.28 Ekuitas

Ekuitas

*Rp1.444.119.156.915,
00*

Ekuitas per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.444.119.156.915,00 dan Rp1.342.991.582.367,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk
Rp1.061.438.630,00 periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp1.061.438.630,00 dan Rp1.079.169.006,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA. 2021 dan 2020*

Uraian	TH 2021	TH 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	39.595.985	91.205.962	230,34
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.500.000	987.500.000	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	33.972.507	463.000	1,36
Pendapatan Anggaran Lain-lain	370.138	44	0,01
Jumlah	1.061.438.630	1.079.169.006	101,67

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember TA 2021 dan 31
Rp34.020.333.152,00 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp34.020.333.152,00 dan Rp29.963.667.833,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Beban	TH 2021	TH 2020
Beban Gaji Pokok PNS	21.806.700.840	20.207.200.040
Beban Pembulatan Gaji PNS	347.450	300.818
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(4.366)	(1.488)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	1.404.245.448	1.347.031.026
Beban Tunjangan Anak PNS	355.178.798	355.497.108
Beban Tunjangan Struktural PNS	955.210.000	941.300.000
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(1.620.000)	0
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.811.090.000	1.512.700.000
Beban Tunjangan PPh PNS	132.790.482	105.902.039
Beban Tunjangan Beras PNS	1.124.682.600	921.107.740
Pengembalian Tunj. Beras PNS		(50.400)
Beban Uang Makan PNS	3.973.745.000	3.455.021.800
Pengembalian Beban Uang Makan PNS		(667.850)
Beban Tunjangan Umum PNS	604.685.000	566.330.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(7.585.100)	(1.110.000)
Beban Uang Lembur	1.860.867.000	553.107.000
Jumlah	34.020.333.152	29.963.667.833

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.836.987.089,00 dan Rp1.909.346.742,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Beban	TH 2021	TH 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.836.987.089	1.909.346.742	(3,79)
Beban Persediaan pita cukai, materai, dan leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1.836.987.089	1.909.346.742	(3,79)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa

Rp94.190.195.817,00

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp94.190.195.817,00 dan Rp67.626.170.915,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	11.875.090.917	9.490.689.487	25
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.298.380	22.508.370	(19)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.016.880.000	969.594.000	5
Beban Barang Operasional Lainnya	1.396.030.578	1.865.386.455	(25)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(4.725.000)	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.139.604.102	4.243.152.070	21
Beban Bahan	5.300.748.705	11.577.376.159	
Pengembalian Beban Bahan	(41.000)	(75.000)	(45)
Beban Honor Output Kegiatan	1.777.427.000	1.756.900.000	1
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(3.520.000)	(680.000)	418
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(35.595.000)	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	27.348.922.140	17.866.226.980	53
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.250.759.883	1.064.301.225	-
Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan	(14.868.455)	(1.050.000)	1.316
Beban Langganan Listrik	1.946.491.705	1.662.988.701	17
Beban Langganan Telepon	31.141.398	35.641.459	(13)
Beban Langganan Air	5.049.175	1.420.450	255
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.312.304.337	1.426.914.416	132
Beban Sewa	4.659.437.180	3.761.037.443	-
Beban Jasa Profesi	25.311.777.500	10.699.805.000	-
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(334.168.953)	(117.136.500)	185
Beban Jasa Lainnya	502.507.545	667.240.000	-
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	(3.663.000)	-	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	626.288.200	60.595.000	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	68.018.480	573.335.200	(88)
Jumlah	94.190.195.817	67.626.170.915	39

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp11.994.059.152,00 Beban pemeliharaan pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.994.059.152,00 dan Rp12.026.808.985,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.162.210.526	8.815.598.108	(7)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penan	-	49.275.000	
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(3.919.500)	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.950.401.415	2.433.880.432	21
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	835.366.711	728.055.445	-
Jumlah	11.944.059.152	12.026.808.985	(1)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp16.616.890.640,00 Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.616.890.640,00 dan Rp10.345.507.845,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Beban	TH 2021	Th 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	14.765.235.145	8.015.967.847	84,20
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(406.540.633)	(144.832.991)	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	597.952.400	714.569.000	-16,32
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(1.950.000)	(8.585.000)	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	208.874.000	568.504.500	-63,26
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	2.700.000		
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(16.002.200)	(25.856.481)	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.466.621.928	1.225.740.970	0,00
Jumlah	16.616.890.640	10.345.507.845	60,62

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Beban	TH 2021	TH 2020	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan
Sosial
Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	TH 2021	TH 2020	% Naik (Turun)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp19.931.931.876,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.931.931.876,00 dan Rp15.220.740.033,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	TH 2021	TH 2020	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.349.968.410	7.692.460.149	35
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.273.395.143	6.454.644.867	28
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	851.266.737	851.266.737	-
Beban Penyusutan Irigasi	19.808.858	19.808.858	-
Beban Penyusutan Jaringan	10.156.250	10.768.750	(6)
Beban Amortisasi Software	371.963.686	166.497.038	
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	55.372.792	25.293.634	-
Jumlah	19.931.931.876	15.220.740.033	31

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp47.425,00). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Beban	TH 2021	TH 2020	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	(47.425)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	(47.425)	-

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

*Beban Lain-lain
Rp0,00*

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.050.982.771,00*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	TH 2021	TH 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	79.141.388	230.559.121	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.224.698.383	542.823.792	125,62
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	252.857.000	70.787.936	257,20
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.050.982.771	702.594.977	49,59

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2020.*

- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp79.141.388,00 yang merupakan pendapatan dari

penjualan peralatan dan mesin pada Satker BPSDM Hukum dan HAM.

- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:
 1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) senilai Rp4.807.799,00 terdiri dari :
 - a. BPSDM Hukum dan HAM Rp1.968,00.
 - b. Politeknik Imigrasi Rp4.065.617,00.
 - c. Politeknik Ilmu Pemasarakatan Rp36,00.
 - d. Balai Diklat Sulawesi Utara Rp740.178,00.
 2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) senilai Rp117.918.525,00 terdiri dari :
 - a. Politeknik Imigrasi Rp115.418.525,00.
 - b. Politeknik Ilmu Pemasarakatan Rp2.500.000,00.
 3. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal (425913) senilai Rp1.101.972.059,00 terdiri dari :
 - a. BPSDM Hukum dan HAM Rp. Rp835.253.420,00.
 - b. Balai Diklat Jawa Tengah Rp266.718.639,00.
 4. Pendapatan Anggaran lain-lain (425999) senilai Rp370.136,00 terdapat pada satker Balai Diklat Jawa Tengah
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp252.857.000,00 terdapat pada Satker Poltekkip

D.13 POS-POS LUAR BIASA

*Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00*

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Defisit Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.342.991.582.367,00 dan Rp1.230.994.765.415,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah defisit sebesar (Rp176.427.976.325,00) dan (Rp135.310.431.008,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2021 sebesar Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

Koreksi

Reklasifikasi Aset

(Rp5.512.500,00)

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp5.512.500,00) dan (Rp50.593.500,00). Dari Satker Politeknik Imigrasi berupa selisih nilai penyusutan transaksional reklasifikasi keluar dan masuk yang beda masa manfaatnya. sebesar Rp6.125.000,00 dicatat sebagai jaringang dengan masa manfaat 40 tahun kemudian diubah menjadi *software* dengan masa manfaat nilai penyesuaiannya Rp612.500,00. Serta koreksi dari jaringan ke software Rp49.000.000,00.

Rincian Koreksi Reklasifikasi Aset

Per 31 Desember 2021

Jenis	Nilai Koreksi	Keterangan
Software	Rp 49.000.000	rekas masuk software
Akm. Amortisasi Software	Rp (6.125.000)	selisih nilai penyusutan transaksional reklasifikasi keluar dan masuk yang beda masa manfaatnya dari 40 tahun menjadi 4 tahun
Jaringan	Rp (49.000.000)	rekas keluar software
Akm. Penyusutan Jaringan	Rp 612.500	selisih nilai penyusutan transaksional reklasifikasi keluar dan masuk yang beda masa manfaatnya dari 40 tahun menjadi 4 tahun
Jumlah	Rp (5.512.500)	-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp0,00 Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp529.978.604,00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp1.227.619.436,00) Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebesar (Rp1.227.619.436,00) dan (Rp5,758,110,001,00). Koreksi Nilai Aset Non revaluasi terdiri dari:

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2021

Satker	Uraian akun Yang dikoreksi	Nilai	Keterangan
BPSDM	Gedung dan Bangunan	Rp (829.541.975)	Koreksi nilai atas temuan BPK
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 8.295.420	Penyusutan reguler nilai koreksi
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp (1.275.000)	Koreksi atas pengembalian belanja
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp (9.830.000)	Koreksi atas pengembalian belanja
	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	Rp 1.275.000	Pengembalian belanja
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 9.830.000	Pengembalian belanja
BADIKLAT JATENG	Gedung dan Bangunan	Rp (158.963.710)	Koreksi perubahan nilai berdasarkan hasil temuan Inspektorat Jenderal Kemenkumham

	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 1.589.637	Penyusutan reguler semester I TA 2021
	Gedung dan Bangunan	Rp (197.905.491)	Koreksi perubahan nilai berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 1.979.054	Penyusutan reguler semester I TA 2021
	Peralatan dan Mesin	Rp 3.243.300	Penyusutan reguler semester II TA 2021
	Gedung dan Bangunan	Rp 4.227.007.648	Normalisasi Gedung Kantor Permanen karena adanya Nilai Buku Minus pada E-Rekon LK
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp (1.247.320)	Penyusutan reguler semester II TA 2021
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp (42.270.076)	Penyusutan reguler semester II TA 2021
	Gedung dan Bangunan	Rp (4.227.007.648)	Normalisasi Gedung Kantor Permanen karena adanya Nilai Buku Minus pada E-Rekon LK
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 40.865.975	Normalisasi data K3 pada aplikasi SIMAK BMN
POLTEKIM	Peralatan dan Mesin	Rp (121.369.000)	Normalisasi aset
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 67.704.750	penyusutan bmn yang di normalisasi
Jumlah		Rp (1.227.619.436)	-

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp.275.000,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp275.000,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	275.000
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	275.000

Koreksi ini merupakan koreksi pendapatan atas pengembalian sewa gedung ALTRI

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp278.788.407.809,0
0

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp278.788.407.809,00 dan Rp252.585.972.857,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	277.241.351.217
Diterima dari Entitas Lain	(2.390.398.387)
Transfer Keluar	(18.097.200)
Transfer Masuk	3.932.552.179
Pengesahan Hibah Langsung	23.000.000
Jumlah	278.788.407.809

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja

pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember TA 2021, DDEL sebesar (Rp2.390.398.387,00) sedangkan DKEL sebesar Rp277.241.351.217,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember TA 2021 sebesar Rp3.932.552.179,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar (Rp18.097.200,00) dari Balai Diklat Jawa Tengah kepada Kanwil Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah berupa peralatan. Terdapat perbedaan atau selisih antara saldo transfer keluar dengan saldo transfer masuk senilai Rp198.605.000,00 pada satker BPSDM dikarekan Ditjen Kekayaan Intelektual mencatat transfer keluar menggunakan akun Aset tetap Renovasi (13511) sedangkan BPSDM mencatat transfer masuk menggunakan akun Gedung dan Bangunan (13311)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember TA 2021 sebesar Rp23.000.000,00 terdapat pada Badiklat Kepri yang merupakan hibah sepeda motor satu buah dari Bank Negara Indonesia

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember TA 2021 adalah Rp0,00.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp1.443.969.539.317,
00

Nilai ekuitas pada 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.443.969.539.317,00 dan Rp1.342.991.582.367,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada Eselon I BPSDM Hukum dan HAM dengan rincian sebagai berikut:
 - BPSDM Hukum dan HAM terdapat Jurnal Tidak Lazim sebesar Rp1.275.000,00 atas pengembalian honor pokja pembangunan Politeknik di Tangerang. Tercatat pada Jurnal Umum sebagai gedung dan bangunan belum diregister dikarenakan kesalahan penggunaan akun aset sehingga dilakukan koreksi nilai aset non revaluasi. Sebesar Rp9.830.000,00 atas pengembalian belanja yang membentuk aset gedung dan bangunan. Sebesar Rp26.257.000,00 atas beban aset ekstrakomtabel untuk pembelian tabung pemadam api sebanyak 31 buah Rp25.257.000,00 (31 x Rp847.000,00) dan jurnal atas pembelian barang ekstrakomtabel menggunakan akun 521832 sebesar Rp12.187.980,00 berupa portable hardisk Rp11.362.980,00 (1x Rp957.000,00), (6x Rp957.000,00), (4x Rp950.070,00), (1x Rp863.700) dan pembelian Head set Rp825.000,00 (3 x Rp275.000,00).
 - Politeknik Pemasarakatan terdapat Jurnal Tidak Lazim senilai Rp29.573.500,00 tercatat sebagai peralatan dan mesin belum diregister karena pembelian aset di bawah nilai kapitaliasi dengan rincian Rp13.898.500,00 (pembelian satu set tandu harga Rp918.000,00 dan 20 box strip lipid pro harga satuan Rp713.900,00) dan Rp15.675.000,00 (pembelian 30 buah kursi futura harga satuan Rp522.500,00).
 - Balai diklat Kepulauan Riau sebesar Rp23.000.000,00 atas hibah satu motor dari bank Mandiri

2. Terdapat realisasi Belanja Sewa (522141) pada Eselon I BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp4.659.437.180 dengan rincian sebagai berikut :
- BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp2.114.819.000 yang merupakan belanja sewa mesin fotocopy, sewa mobil kendaraan operasional pejabat, sewa laptop untuk kegiatan penilaian kompetensi dan sewa pengharum ruangan.
 - Politeknik Imigrasi sebesar Rp1.07.459.980 merupakan belanja sewa mobil kendaraan operasional pejabat, sewa mesin fotocopy dan sewa bus untuk kegiatan calon taruna dan taruna Politeknik Imigrasi.
 - Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp482.594.000 merupakan belanja sewa kendaraan operasional pejabat, sewa mesin fotocopy sewa bus kegiatan Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan.
 - Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp499.002.000 merupakan belanja sewa kendaraan operasional, sewa gedung kantor, dan sewa mesin fotocopy.
 - Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp292.330.600 merupakan belanja sewa kendaraan operasional, sewa LED kunjungan kerja menteri, sound system kunjungan kerja menteri, dan sewa kendaraan kegiatan.
 - Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp195.231.600 merupakan belanja sewa kendaraan operasional.
3. Aset Tetap pada POLTEKIP berupa tanah seluas 2.559m² dan bangunan seluas 2.425m² berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi yang saat ini dalam proses penagihan uang sewanya (Surat penagihan BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM.I-PW.01-16 tanggal 30 Oktober 2019). Berdasarkan SEK-53.PB.04.02 tanggal 2 April Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Politeknik Ilmu Pemasarakatan

dengan Nomor NTPN 534007QLTJRLB12 tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

4. Koreksi terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas gedung dan bangunan karena kelebihan pembayaran perencanaan pembangunan gedung Politeknik Tangerang yaitu pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp510.572.600,-
5. Koreksi terhadap temuan Inspektorat Jenderal pada Balai Diklat Jawa Tengah senilai Rp68.813.148,00 dengan rincian:
 - Konsultasi Perencanaan Pagar senilai Rp1.390.000,00.
 - Pelaksana Pembangunan Pagar Rp28.098.746,00.
 - Konsultan Perencana Gedung Rp2.448.750,00.
 - Pelaksana Pembangunan Gedung Rp31.875.652,00.
 - Pengawas Pembangunan Gedung Rp2.400.000,00.
 - Transport Lokal Pengelola Kegiatan Rp2.600.000,00.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- I. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
 - a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.
 - b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.
 - c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.
 - d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2021.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	SMT I TA 2021		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
52	BELANJA BARANG			
5211	Belanja Barang Operasional			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	5.164.079.000	5.139.604.102	99,53
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5.164.079.000	5.139.604.102	99,53
5212	Belanja Barang Non Operasional			
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	4.457.376.000	4.235.891.428	0,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4.457.376.000	4.235.891.428	99,53
5218	Belanja Barang Persediaan			
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	443.490.000	442.668.487	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	443.490.000	442.668.487	99,53
5221	Belanja Jasa			
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	652.415.000	622.625.200	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	652.415.000	622.625.200	99,53
5241	Belanja perjalanan Dalam Negeri			
524115	Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi covid-19	2.700.000	2700000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK 5241	2.700.000	2.700.000	
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada			
526322	Belanja Barang Untuk bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang-penanganan Pandemi covid-19	129.000.000	-	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	129.000.000	-	0,00
53	BELANJA MODAL			
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	51.200.000	50.563.000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	51.200.000	50.563.000	98,76
	JUMLAH BELANJA	10.900.260.000	10.494.052.217	96,27

- Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) Rp5.139.604.102,00 terdiri dari: Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp4.152.460.501,00, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp444.370.480,00, Satker Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp500.467.363,00, satker Badiklat Kepulauan Riau Rp1.348.600,00, satker Badiklat Jawa Tengah Rp868.858,00 dan Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp40.088.300,00.
- Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) Rp4.235.891.428,00, berasal dari

satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp868.650.521,00 pengembalian belanja sebesar Rp14.489.855,00, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp1.075.971.950,00 dengan pengembalian belanja sebesar Rp378.600,00, satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp1.081.439.798,00, satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp359.723.000,00, satker Badiklat Jawa Tengah Rp388.378.503,00 dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp461.727.656,00.

- Realisasi Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19 (521841) Rp442.668.487,00, berasal dari satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan senilai Rp290.980.700,00 satker Balai Diklat Kepulauan riau senilai Rp65.995.000,00 dan satker Balai Diklat Jawa Tengah senilai Rp85.692.787,00.
- Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp622.625.200,00 berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp334.263.000,00 dengan pengembalian sebesar Rp3.663.000,00 satker Badiklat Kepulauan Riau Rp94.874.700,00, satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp22.914.000,00, dan satker Balai Diklat Sulawesi Utara Rp170.573.500,00. Sebesar Rp2.700.000,00 berasal dari satker BPSDM.
- Realisasi Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19 (524115)
- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi (532119) sebesar Rp50,563,000,00 berasal dari Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp38.163.000,00 Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp12.400.000,00.

III. Pengajuan Perubahan Semula Menjadi terhadap pandemic Covid-19 satker BPSDM Hukum dan HAM dilampirkan pada data (terlampir).

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 23/02/2022 1:36 AM
lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	55,000,000	(55,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(275,000)	275,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	54,725,000	(54,725,000)	(100.00)
Persediaan	547,013,508	736,417,740	(189,404,232)	(25.72)
JUMLAH ASET LANCAR	547,013,508	791,142,740	(244,129,232)	(30.86)
ASET TETAP				
Tanah	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	92,755,631,717	77,320,563,531	15,435,068,186	19.96
Gedung dan Bangunan	335,299,814,950	239,994,199,536	95,305,615,414	39.71
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,395,644,993	9,444,644,993	(49,000,000)	(0.52)
Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	2,972,643,997	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7,992,464,203	0	7,992,464,203	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(96,423,826,334)	(77,647,443,838)	(18,776,382,496)	24.18
JUMLAH ASET TETAP	1,440,992,441,526	1,341,084,676,219	99,907,765,307	7.45
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,537,559,833	1,835,302,990	702,256,843	38.26
Aset Lain-lain	8,310,389,928	7,090,315,928	1,220,074,000	17.21
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(8,192,449,669)	(7,704,177,285)	(488,272,384)	6.34
JUMLAH ASET LAINNYA	2,655,500,092	1,221,441,633	1,434,058,459	117.41
JUMLAH ASET	1,444,194,955,126	1,343,097,260,592	101,097,694,534	7.53
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Pendapatan Diterima Dimuka	75,798,211	105,678,225	(29,880,014)	(28.27)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	75,798,211	105,678,225	(29,880,014)	(28.27)
JUMLAH KEWAJIBAN	75,798,211	105,678,225	(29,880,014)	(28.27)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,444,119,156,915	1,342,991,582,367	101,127,574,548	7.53
JUMLAH EKUITAS	1,444,119,156,915	1,342,991,582,367	101,127,574,548	7.53
JUMLAH EKUITAS	1,444,119,156,915	1,342,991,582,367	101,127,574,548	7.53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,444,194,955,126	1,343,097,260,592	101,097,694,534	7.53

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 23/02/2022 1:35 AM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	3,938,319,783	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,309,259,387	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	93,639,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan Yang Dialokasikan	987,500,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	21,934,033,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	375,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,418,575,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	363,656,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	957,789,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,819,305,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	140,206,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,130,874,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	4,037,120,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	615,467,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	1,863,163,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	12,273,914,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	50,004,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,017,454,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,471,909,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5,164,079,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	5,544,765,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,843,395,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	27,359,172,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4,457,376,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	925,724,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	249,344,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	443,490,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	1,952,904,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	31,512,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	6,468,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	3,341,181,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	4,672,778,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	25,762,000,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	558,780,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	652,415,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	8,178,430,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,227,962,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,995,032,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	14,887,130,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 23/02/2022 1:35 AM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	679,200,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	210,724,000
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,700,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,492,621,000
2.0	526322	Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	129,000,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	16,240,948,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	51,200,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	101,943,974,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	370,000,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	711,523,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	64,715,971
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	987,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	33,972,507
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117,918,525
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,101,972,059
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,806,700,840	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	347,450	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,366
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,404,245,448	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	355,178,798	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	955,210,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,620,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,811,090,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	132,790,482	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,124,682,600	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,973,745,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	604,685,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	7,585,100
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,860,867,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,875,090,917	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,298,380	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,016,880,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,396,030,578	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 23/02/2022 1:35 AM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	4,725,000
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,139,604,102	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,300,748,705	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	41,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,777,427,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	3,520,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,348,922,140	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	35,595,000
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4,250,759,883	0
3.1	521241	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	14,868,455
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	906,936,035	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	242,643,825	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	442,668,487	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,946,491,705	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	31,141,398	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	5,049,175	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,312,304,337	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,659,437,180	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	25,311,777,500	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	334,168,953
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	502,507,545	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	626,288,200	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,663,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,162,210,526	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,155,746,201	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,950,401,415	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,919,500
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	14,765,235,145	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	406,540,633
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	597,952,400	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,950,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	208,874,000	0
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	2,700,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,466,621,928	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	16,002,200
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,869,848,306	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	50,563,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101,640,554,566	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	11,105,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 23/02/2022 1:35 AM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	367,146,227	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	708,256,000	0
JUMLAH			284,415,377,594	284,415,377,594

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 23/02/2022 1:36 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	499,869,908	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	47,143,600	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	92,755,631,717	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	335,299,814,950	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	7,992,464,203	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	58,699,199,146
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	32,255,569,942
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,976,710,460
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	89,139,861
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	865,706,925
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	2,537,559,833	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,310,389,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,887,500,871
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,304,948,798
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	75,798,211
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	277,241,351,217
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,390,398,387	0
0.0	313211	Transfer Keluar	18,097,200	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,932,552,179
0.0	391111	Ekuitas	0	1,342,991,582,367
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,227,619,436	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	275,000
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	23,000,000
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	5,512,500	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	39,595,985

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 23/02/2022 1:36 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	987,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	33,972,507
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117,918,525
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,101,972,059
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	21,806,700,840	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	347,450	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	4,366
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,404,245,448	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	355,178,798	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	955,210,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,620,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,811,090,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	132,790,482	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,124,682,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,973,745,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	604,685,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	7,585,100
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,860,867,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	11,875,090,917	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,298,380	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,016,880,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,396,030,578	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	4,725,000
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5,139,604,102	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,300,748,705	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	41,000
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,777,427,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	3,520,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	27,348,922,140	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	35,595,000
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4,250,759,883	0
3.1	521241	Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	14,868,455
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,946,491,705	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	31,141,398	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,049,175	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,312,304,337	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,659,437,180	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 23/02/2022 1:36 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	25,311,777,500	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	334,168,953
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	502,507,545	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	626,288,200	0
3.1	522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,663,000
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,162,210,526	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,950,401,415	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,919,500
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	14,765,235,145	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	406,540,633
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	597,952,400	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,950,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	208,874,000	0
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	2,700,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,466,621,928	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	16,002,200
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10,349,968,410	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,273,395,143	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	851,266,737	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	19,808,858	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	10,156,250	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	371,963,686	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	55,372,792	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,836,987,089	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	835,366,711	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	68,018,480	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	252,857,000	0
JUMLAH			1,732,080,316,585	1,732,080,316,585

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI

Tgl. Cetak 07/03/2022

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	55,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	275,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	567,752,386	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	168,665,354	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	77,320,563,531	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	239,994,199,536	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,227,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	48,974,750,936
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	24,084,255,001
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,125,443,723
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	69,331,003
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	856,163,175
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	1,835,302,990	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7,090,315,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,780,509,807
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	923,667,478
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	105,678,225
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,342,991,582,367
JUMLAH			1,428,449,156,715	1,428,449,156,715

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
 Tanggal : 23/02/22 1:36 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif--

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,081,139,000	2,390,398,387	1,309,259,387	221	849,625,000	1,536,070,852	686,445,852	181
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,081,139,000	2,390,398,387	1,309,259,387	221	849,625,000	1,536,070,852	686,445,852	181
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	34,280,563,000	34,020,333,152	(260,229,848)	99	30,330,246,000	29,970,614,033	(359,631,967)	99
	BELANJA BARANG	127,581,463,000	124,595,754,966	(2,985,708,034)	98	95,456,978,000	90,705,625,873	(4,751,352,127)	95
	BELANJA MODAL	119,317,645,000	118,625,263,099	(692,381,901)	99	108,092,287,000	107,433,288,110	(658,998,890)	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	281,179,671,000	277,241,351,217	(3,938,319,783)	99	233,879,511,000	228,109,528,016	(5,769,982,984)	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/03/22 2:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	79,141,388	0	79,141,388	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93,639,000	64,715,971	0	64,715,971	69.11
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	93,639,000	143,857,359	0	143,857,359	153.63
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	987,500,000	0	987,500,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	987,500,000	0	987,500,000	100
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	33,972,507	0	33,972,507	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	33,972,507	0	33,972,507	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,807,799	0	4,807,799	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117,918,525	0	117,918,525	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,101,972,059	0	1,101,972,059	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	370,138	0	370,138	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,225,068,521	0	1,225,068,521	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,081,139,000	2,390,398,387	0	2,390,398,387	221.1
	JUMLAH PENDAPATAN	1,081,139,000	2,390,398,387	0	2,390,398,387	221.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/02/22 1:37 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	17,186,843,000	21,934,033,000	21,806,700,840	0	21,806,700,840	99.42	127,332,160
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	326,000	375,000	347,450	4,366	343,084	91.49	31,916
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,893,394,000	1,418,575,000	1,404,245,448	0	1,404,245,448	98.99	14,329,552
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	347,414,000	363,656,000	355,178,798	0	355,178,798	97.67	8,477,202
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	985,320,000	957,789,000	955,210,000	1,620,000	953,590,000	99.56	4,199,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,398,540,000	1,819,305,000	1,811,090,000	0	1,811,090,000	99.55	8,215,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	117,944,000	140,206,000	132,790,482	0	132,790,482	94.71	7,415,518
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,034,643,000	1,130,874,000	1,124,682,600	0	1,124,682,600	99.45	6,191,400
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,615,084,000	4,037,120,000	3,973,745,000	0	3,973,745,000	98.43	63,375,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	710,228,000	615,467,000	604,685,000	7,585,100	597,099,900	97.02	18,367,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	27,289,736,000	32,417,400,000	32,168,675,618	9,209,466	32,159,466,152	99.23	257,933,848
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,079,259,000	1,863,163,000	1,860,867,000	0	1,860,867,000	99.88	2,296,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,079,259,000	1,863,163,000	1,860,867,000	0	1,860,867,000	99.88	2,296,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	28,368,995,000	34,280,563,000	34,029,542,618	9,209,466	34,020,333,152	99.27	260229848
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,924,952,000	12,273,914,000	11,875,090,917	0	11,875,090,917	96.75	398,823,083
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	39,800,000	50,004,000	18,298,380	0	18,298,380	36.59	31,705,620
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,080,465,000	1,017,454,000	1,016,880,000	0	1,016,880,000	99.94	574,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,182,286,000	1,471,909,000	1,396,030,578	4,725,000	1,391,305,578	94.52	80,603,422
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	44,720,000	5,164,079,000	5,139,604,102	0	5,139,604,102	99.53	24,474,898
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	12,272,223,000	19,977,360,000	19,445,903,977	4,725,000	19,441,178,977	97.34	536,181,023
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	47,995,932,000	5,544,765,000	5,300,748,705	41,000	5,300,707,705	95.6	244,057,295
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,284,430,000	1,843,395,000	1,777,427,000	3,520,000	1,773,907,000	96.23	69,488,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	57,533,262,000	27,359,172,000	27,348,922,140	35,595,000	27,313,327,140	99.83	45,844,860
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1,209,450,000	4,457,376,000	4,250,759,883	14,868,455	4,235,891,428	95.03	221,484,572
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	109,023,074,000	39,204,708,000	38,677,857,728	54,024,455	38,623,833,273	98.66	580,874,727
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,755,534,000	925,724,000	906,936,035	0	906,936,035	97.97	18,787,965
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	10,100,000	249,344,000	242,643,825	0	242,643,825	97.31	6,700,175
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	7,965,000	443,490,000	442,668,487	0	442,668,487	99.81	821,513
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,773,599,000	1,618,558,000	1,592,248,347	0	1,592,248,347	98.37	26,309,653

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
 ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 23/02/22 1:37 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,181,000,000	1,952,904,000	1,946,491,705	0	1,946,491,705	99.67	6,412,295
522112	Belanja Langganan Telepon	87,600,000	31,512,000	31,141,398	0	31,141,398	98.82	370,602
522113	Belanja Langganan Air	19,200,000	6,468,000	5,049,175	0	5,049,175	78.06	1,418,825
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,728,441,000	3,341,181,000	3,312,304,337	0	3,312,304,337	99.14	28,876,663
522141	Belanja Sewa	10,095,892,000	4,672,778,000	4,659,437,180	0	4,659,437,180	99.71	13,340,820
522151	Belanja Jasa Profesi	21,272,100,000	25,762,000,000	25,311,777,500	334,168,953	24,977,608,547	96.96	784,391,453
522191	Belanja Jasa Lainnya	526,193,000	558,780,000	502,507,545	0	502,507,545	89.93	56,272,455
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	777,750,000	652,415,000	626,288,200	3,663,000	622,625,200	95.43	29,789,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,688,176,000	36,978,038,000	36,394,997,040	337,831,953	36,057,165,087	98.42	920,872,913
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,523,010,000	8,178,430,000	8,162,210,526	0	8,162,210,526	99.8	16,219,474
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	640,373,000	1,227,962,000	1,155,746,201	0	1,155,746,201	94.12	72,215,799
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,242,182,000	2,995,032,000	2,950,401,415	3,919,500	2,946,481,915	98.38	48,550,085
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,405,565,000	12,401,424,000	12,268,358,142	3,919,500	12,264,438,642	98.93	136,985,358
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	66,767,699,000	14,887,130,000	14,765,235,145	406,540,633	14,358,694,512	96.45	528,435,488
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,981,400,000	679,200,000	597,952,400	1,950,000	596,002,400	87.75	83,197,600
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37,500,000	210,724,000	208,874,000	0	208,874,000	99.12	1,850,000
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	307,320,000	1,492,621,000	1,466,621,928	16,002,200	1,450,619,728	97.19	42,001,272
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	70,093,919,000	17,272,375,000	17,041,383,473	424,492,833	16,616,890,640	98.66	655,484,360
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk	0	129,000,000	0	0	0	0	129,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	129,000,000	0	0	0	0	129,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	234,256,556,000	127,581,463,000	125,420,748,707	824,993,741	124,595,754,966	98.31	2985708034
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	641,750,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	641,750,000	0	0	0	0		0
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,479,000,000	16,240,948,000	15,869,848,306	0	15,869,848,306	97.72	371,099,694
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	51,200,000	50,563,000	0	50,563,000	98.76	637,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,479,000,000	16,292,148,000	15,920,411,306	0	15,920,411,306	97.72	371,736,694
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/02/22 1:37 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213,642,767,000	101,943,974,000	101,640,554,566	11,105,000	101,629,449,566	99.69	314,524,434
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	292,634,000	0	0	0	0	0	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	370,000,000	367,146,227	0	367,146,227	99.23	2,853,773
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	213,935,401,000	102,313,974,000	102,007,700,793	11,105,000	101,996,595,793	99.7	317,378,207
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	711,523,000	708,256,000	0	708,256,000	99.54	3,267,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	711,523,000	708,256,000	0	708,256,000	99.54	3,267,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	220,056,151,000	119,317,645,000	118,636,368,099	11,105,000	118,625,263,099	99.43	692381901
	JUMLAH BELANJA	482,681,702,000	281,179,671,000	278,086,659,424	845,308,207	277,241,351,217	98.9	3,938,319,783

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/02/22 1:37 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,720,000	5,164,079,000	5,139,604,102	0	5,139,604,102	99.53	24,474,898
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	44,720,000	5,164,079,000	5,139,604,102	0	5,139,604,102	99.53	24,474,898
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,209,450,000	4,457,376,000	4,250,759,883	14,868,455	4,235,891,428	95.03	221,484,572
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,209,450,000	4,457,376,000	4,250,759,883	14,868,455	4,235,891,428	95.36	221,484,572
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	7,965,000	443,490,000	442,668,487	0	442,668,487	99.81	821,513
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,965,000	443,490,000	442,668,487	0	442,668,487	99.81	821,513
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	777,750,000	652,415,000	626,288,200	3,663,000	622,625,200	95.43	29,789,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	777,750,000	652,415,000	626,288,200	3,663,000	622,625,200	96	29,789,800
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	0	129,000,000	0	0	0	0	129,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	129,000,000	0	0	0	0	129,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,039,885,000	10,849,060,000	10,462,020,672	18,531,455	10,443,489,217	96.43	405570783
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	51,200,000	50,563,000	0	50,563,000	98.76	637,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	51,200,000	50,563,000	0	50,563,000	98.76	637,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	51,200,000	50,563,000	0	50,563,000	98.76	637000
	JUMLAH BELANJA	2,039,885,000	10,900,260,000	10,512,583,672	18,531,455	10,494,052,217	96.44	406,207,783

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
ESELON I

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 23/02/22 1:36 AM
Halaman : 1
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,061,438,630	1,079,169,006	(17,730,376)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,061,438,630	1,079,169,006	(17,730,376)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,061,438,630	1,079,169,006	(17,730,376)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	34,020,333,152	29,963,667,833	4,056,665,319	-
Beban Persediaan	1,836,987,089	1,909,346,742	(72,359,653)	-
Beban Barang dan Jasa	94,190,195,817	67,626,170,915	26,564,024,902	-
Beban Pemeliharaan	11,944,059,152	12,026,808,985	(82,749,833)	-
Beban Perjalanan Dinas	16,616,890,640	10,345,507,845	6,271,382,795	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN
ESELON I

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
: 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 23/02/22 1:36 AM
Halaman : 2
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	19,931,931,876	15,220,740,033	4,711,191,843	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(47,425)	47,425	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	178,540,397,726	137,092,194,928	41,448,202,798	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(177,478,959,096)	(136,013,025,922)	(41,465,933,174)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	79,141,388	230,559,121	(151,417,733)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	79,141,388	230,559,121	(151,417,733)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	971,841,383	472,035,793	499,805,590	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,224,698,383	542,823,729	681,874,654	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	252,857,000	70,787,936	182,069,064	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,050,982,771	702,594,914	348,387,857	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(176,427,976,325)	(135,310,431,008)	(41,117,545,317)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(176,427,976,325)	(135,310,431,008)	(41,117,545,317)	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Lap : Lpe.es1
Tanggal : 23/02/22 1:37 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_es1

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,342,991,582,367	1,230,994,765,415	111,996,816,952	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(176,427,976,325)	(135,310,431,008)	(41,117,545,317)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,232,856,936)	(5,278,724,897)	4,045,867,961	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(5,512,500)	(50,593,500)	45,081,000	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	529,978,604	(529,978,604)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,227,619,436)	(5,758,110,001)	4,530,490,565	-
LAIN-LAIN	275,000	0	275,000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	278,788,407,809	252,585,972,857	26,202,434,952	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	101,127,574,548	111,996,816,952	(10,869,242,404)	-
EKUITAS AKHIR	1,444,119,156,915	1,342,991,582,367	101,127,574,548	-

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB- : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 07/03/22 2:54 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	499,869,908
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	47,143,600
131111	Tanah	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	92,755,631,717
133111	Gedung dan Bangunan	335,299,814,950
134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693
134112	Irigasi	831,972,000
134113	Jaringan	1,178,766,300
135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	7,992,464,203
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(58,699,199,146)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(32,255,569,942)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,976,710,460)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(89,139,861)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(865,706,925)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,537,500,000)
162151	Software	2,537,559,833
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,310,389,928
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(6,887,500,871)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,304,948,798)
J U M L A H		1,444,194,955,126

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 07/03/22 2:54 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	200,933	1,089,000,068,000	0	0	2,238	0	198,695	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	200,933	1,089,000,068,000	0	0	2,238	0	198,695	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	11,689	77,320,563,531	2,378	16,281,658,206	114	846,590,020	13,953	92,755,631,717
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	6	158,356,000	0	0	7	221,856,000
30103	ALAT BANTU	35	798,515,620	13	681,067,200	0	0	48	1,479,582,820
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	68	9,109,477,500	4	1,164,400,000	8	543,902,000	64	9,729,975,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	12	40,373,000	1	1,485,000	0	0	13	41,858,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	23	82,825,000	3	13,000,000	0	0	26	95,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	2,300,000	1	3,850,000	0	0	3	6,150,000
30303	ALAT UKUR	2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	9	34,083,005	0	0	0	0	9	34,083,005
30501	ALAT KANTOR	1,426	9,050,749,320	210	1,386,400,330	2	22,800,000	1,634	10,414,349,650
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,558	27,448,513,015	1,897	9,403,695,066	91	146,309,020	9,364	36,705,899,061
30601	ALAT STUDIO	262	7,437,835,594	32	332,682,000	0	0	294	7,770,517,594
30602	ALAT KOMUNIKASI	180	1,273,858,925	0	0	0	0	180	1,273,858,925
30603	PERALATAN PEMANCAR	23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	350	976,143,500	17	66,444,500	1	3,080,000	366	1,039,508,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	12,306,000	4	14,470,000	0	0	5	26,776,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	43	686,799,500	1	18,381,000	0	0	44	705,180,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	1,000	14,097,131,579	144	2,450,227,510	8	116,909,000	1,136	16,430,450,089
31002	PERALATAN KOMPUTER	551	3,806,209,173	40	302,466,500	4	13,590,000	587	4,095,085,673
31301	SUMUR	8	117,197,000	1	34,760,000	0	0	9	151,957,000
31503	ALAT SAR	3	21,400,000	2	240,823,100	0	0	5	262,223,100
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	46,750,000	0	0	0	0	2	46,750,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	34	190,359,400	2	9,150,000	0	0	36	199,509,400
133111	Gedung dan Bangunan	66	239,994,199,536	3	102,113,746,238	10	6,808,130,824	59	335,299,814,950
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	37	167,625,372,448	2	98,203,163,638	1	5,224,700,166	38	260,603,835,920
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	26	64,662,613,761	0	226,580,600	9	1,489,296,680	17	63,399,897,681
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	7,706,213,327	1	3,684,002,000	0	94,133,978	4	11,296,081,349

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 07/03/22 2:54 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	6	1,227,766,300	0	0	1	49,000,000	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
50402	JARINGAN LISTRIK	1	49,000,000	0	0	1	49,000,000	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,405	7,090,315,928	25	1,835,203,000	6	615,129,000	1,424	8,310,389,928
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	7	386,902,000	6	615,129,000	22	2,269,616,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	304	2,010,629,282	2	22,800,000	0	0	306	2,033,429,282
30502	ALAT RUMAH TANGGA	850	418,230,966	4	18,579,000	0	0	854	436,809,966
30601	ALAT STUDIO	9	10,957,650	0	0	0	0	9	10,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	12	36,818,500	0	0	0	0	12	36,818,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	1	3,080,000	0	0	3	3,242,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	115	1,100,818,774	0	0	0	0	115	1,100,818,774
31002	PERALATAN KOMPUTER	19	10,503,882	2	9,130,000	0	0	21	19,633,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	9	1,394,712,000	0	0	9	1,394,712,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,425,822,435,985		120,230,607,444		8,318,849,844		1,537,734,193,585

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 07/03/22 2:54 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	200,933	1,089,000,068,000	0	0	2,238	0	198,695	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	200,933	1,089,000,068,000	0	0	2,238	0	198,695	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	15,777	78,732,177,420	2,506	16,360,260,934	121	851,150,020	18,162	94,241,288,334
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	6	158,356,000	0	0	7	221,856,000
30103	ALAT BANTU	35	798,515,620	13	681,067,200	0	0	48	1,479,582,820
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	68	9,109,477,500	4	1,164,400,000	8	543,902,000	64	9,729,975,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	12	40,373,000	1	1,485,000	0	0	13	41,858,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	23	82,825,000	3	13,000,000	0	0	26	95,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	2,425,000	1	3,850,000	0	0	4	6,275,000
30303	ALAT UKUR	2	53,677,000	0	0	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	10	34,783,005	0	0	0	0	10	34,783,005
30501	ALAT KANTOR	2,178	9,175,111,070	251	1,415,657,330	6	24,800,000	2,423	10,565,968,400
30502	ALAT RUMAH TANGGA	10,669	28,637,285,606	1,937	9,426,085,446	94	148,869,020	12,512	37,914,502,032
30601	ALAT STUDIO	311	7,472,829,842	35	333,507,000	0	0	346	7,806,336,842
30602	ALAT KOMUNIKASI	215	1,287,621,425	0	0	0	0	215	1,287,621,425
30603	PERALATAN PEMANCAR	23	241,036,800	0	0	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	372	990,226,000	18	67,313,358	1	3,080,000	389	1,054,459,358
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	3	12,506,000	24	27,450,000	0	0	27	39,956,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	43	686,799,500	1	18,381,000	0	0	44	705,180,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	1,000	14,097,131,579	152	2,450,227,518	8	116,909,000	1,144	16,430,450,097
31002	PERALATAN KOMPUTER	575	3,822,554,473	54	313,829,482	4	13,590,000	625	4,122,793,955
31301	SUMUR	8	117,197,000	1	34,760,000	0	0	9	151,957,000
31503	ALAT SAR	3	21,400,000	3	241,741,600	0	0	6	263,141,600
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	82	62,670,000	0	0	0	0	82	62,670,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	45	192,709,400	2	9,150,000	0	0	47	201,859,400
133111	Gedung dan Bangunan	66	239,994,199,536	3	102,113,746,238	10	6,808,130,824	59	335,299,814,950
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	37	167,625,372,448	2	98,203,163,638	1	5,224,700,166	38	260,603,835,920
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	26	64,662,613,761	0	226,580,600	9	1,489,296,680	17	63,399,897,681
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	7,706,213,327	1	3,684,002,000	0	94,133,978	4	11,296,081,349

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 07/03/22 2:54 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	6	1,227,766,300	0	0	1	49,000,000	5	1,178,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
50402	JARINGAN LISTRIK	1	49,000,000	0	0	1	49,000,000	0	0
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,422	7,093,784,238	29	1,837,203,000	12	618,372,300	1,439	8,312,614,938
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	7	386,902,000	6	615,129,000	22	2,269,616,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	304	2,010,629,282	6	24,800,000	0	0	310	2,035,429,282
30502	ALAT RUMAH TANGGA	857	421,699,266	4	18,579,000	6	3,243,300	855	437,034,966
30601	ALAT STUDIO	9	10,957,650	0	0	0	0	9	10,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	22	36,818,510	0	0	0	0	22	36,818,510
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	1	3,080,000	0	0	3	3,242,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	115	1,100,818,774	0	0	0	0	115	1,100,818,774
31002	PERALATAN KOMPUTER	19	10,503,882	2	9,130,000	0	0	21	19,633,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	9	1,394,712,000	0	0	9	1,394,712,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
TOTAL			1,427,237,518,184		120,311,210,172		8,326,653,144		1,539,222,075,212

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 07/03/22 2:54 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	85	1,835,302,990	22	702,256,843	0	0	107	2,537,559,833
80101	ASET TAK BERWUJUD	85	1,835,302,990	22	702,256,843	0	0	107	2,537,559,833
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,835,302,990		702,256,843		0		2,537,559,833

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tanggal : 07/03/22 2:56 AM

UAPPB-E1 : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		107	2,537,559,833	923,667,478	371,963,686	9,317,634	1,304,948,798	1,232,611,035
80101	ASET TAK BERWUJUD		107	2,537,559,833	923,667,478	371,963,686	9,317,634	1,304,948,798	1,232,611,035
JUMLAH			107	2,537,559,833	923,667,478	371,963,686	9,317,634	1,304,948,798	1,232,611,035